

Meningkatkan akses dan partisipasi penyandang disabilitas (PD) dalam pendidikan tinggi vokasi di Indonesia: Tantangan dan pilihan kebijakan

A. Pendahuluan

Program Skills for Prosperity yang diselenggarakan oleh ILO dan didanai oleh Pemerintah Inggris bertujuan untuk meningkatkan sistem dan kebijakan keterampilan nasional, melakukan langkah tepat sasaran untuk mendukung perempuan dan laki-laki – termasuk yang berasal dari kelompok kurang beruntung – untuk mengakses keterampilan dan pekerjaan yang layak di sektor maritim Indonesia yang sedang berkembang.

Penyandang disabilitas (PD) merupakan salah satu kelompok yang kurang beruntung di Indonesia, karena sangat kurang terwakili dalam pelaporan pekerjaan, pendidikan dan statistik.¹ Memang, penelitian dasar untuk Program Skills for Prosperity yang dilakukan pada bulan Maret 2020² melaporkan bahwa tidak ada siswa PD yang terdaftar di politeknik peserta.

Diperkirakan 16% atau satu dari enam orang mengalami disabilitas di seluruh dunia.³ Bila diekstrapolasikan ke populasi Indonesia yang berjumlah sekira 280 juta, maka akan menunjukkan bahwa lebih dari 44 juta orang Indonesia menyandang disabilitas.

Publikasi ILO berjudul *Memetakan Pekerja Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2022*⁴ memperkirakan 70-80% PD hanya mencapai pendidikan dasar. Angka ini kira-kira dua kali lipat angka untuk bukan PD, yang menjadi tantangan besar bagi PD untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpartisipasi dalam perekonomian.

Meningkatkan inklusi untuk PD disebutkan di seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya di bawah Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4), Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan 8), Pengurangan Ketimpangan (Tujuan 10), Komunitas Berkelanjutan (Tujuan 11), serta Penguatan Kemitraan Global (Tujuan 17).

Pemerintah Indonesia telah mengisyaratkan komitmen yang jelas terhadap inklusi PD yang lebih besar melalui Undang-Undang (UU) No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Presiden No. 68/2020 tentang Komite Nasional Disabilitas; dan yang terbaru melalui Presidensi G20 dan Komitmen Bersama untuk mempromosikan pekerjaan yang inklusif dan layak bagi PD di Indonesia⁵ yang ditandatangani oleh ILO dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada bulan Februari 2022.

Guna mendukung prioritas pemerintah tersebut, dan untuk mengkaji kesulitan PD dalam mengakses pendidikan tinggi vokasi, Program Skills for Prosperity bekerja sama dengan Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI)⁶ dan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).⁷

Kerja sama dengan empat politeknik mitra Program Skills for Prosperity – Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Politeknik Maritim Negeri Semarang (Polimarin), Politeknik Negeri Batam (Polibatam) dan Politeknik Negeri Manado (Polim Manado) – melahirkan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas baik untuk staf maupun mahasiswa, dan memfasilitasi penilaian mandiri sebagai panduan untuk mendeskripsikan

1 Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2022. <https://indonesia.un.org/en/209911-un-report-highlights-disability-data-gaps-indonesia>.

2 ILO. "Skills for Prosperity, Gender and Social Inclusion (GSI) Baseline Study" (2020).

3 Organisasi Kesehatan Dunia. 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>

4 ILO. "Pemetaan pekerja dengan disabilitas di Indonesia" (2022). https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_836030/lang-en/index.htm.

5 ILO. "ILO dan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia mempromosikan tempat kerja yang inklusif" (2022). 6 INKLUSI. "Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society" (2022). <https://www.dfat.gov.au/publications/development/australia-indonesia-partnership-towards-inclusive-society-investment-design-document>. https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_837424/lang-en/index.htm

6 INKLUSI. "Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society" (2022). <https://www.dfat.gov.au/publications/development/australia-indonesia-partnership-towards-inclusive-society-investment-design-document>.

7 Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). <https://www.sigab.or.id/en>.

kesiapan masing-masing lembaga untuk menerima dan melakukan penyesuaian yang wajar untuk membantu mahasiswa PD. Penilaian tersebut mengkaji kebijakan dan peraturan tentang inklusi disabilitas serta fasilitas, layanan dan infrastruktur. Masing-masing politeknik kemudian diberi rekomendasi yang dimaksudkan untuk membantu menghilangkan kendala bagi PD dalam mengakses pendidikan tinggi vokasi di lembaga-lembaga tersebut.

Terakhir, prakarsa ini bertujuan untuk memberikan model yang dapat direplikasi yang – didukung oleh kebijakan dan peraturan yang sesuai – dapat membantu lebih banyak PD dalam mengakses kualifikasi pendidikan tinggi vokasi yang lebih luas dan juga dapat mengantarkan langkah mereka ke tempat kerja inklusif yang mendapat manfaat dari tenaga kerja yang berketerampilan tinggi.

B. Kebijakan tentang kesetaraan disabilitas

Di Indonesia, kerangka peraturan berikut menjadi pedoman bagi prakarsa nasional terkait promosi kesetaraan disabilitas dan non-diskriminasi:

1. **Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (2006)**
2. **Kaidah ILO: Mengelola disabilitas di tempat kerja; Konvensi ILO No. 159 dan Rekomendasi ILO No. 168 tentang Rehabilitasi Vokasi dan Ketenagakerjaan (Penyandang Disabilitas), 1983**
3. **Konvensi ILO No. 111 dan Rekomendasi ILO No. 111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958**
4. **UU Nasional No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas** (dalam bahasa Indonesia) dengan peraturan pelaksana mengenai PD di bidang pendidikan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
 - b. PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Layak bagi Siswa Penyandang Disabilitas

- c. PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
- d. PP No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Pelayanan Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas
- e. PP No. 67 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Penghargaan berkenaan dengan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- f. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Rincian tentang standar dan peraturan tersedia di situs web ILO.⁸

C. Peningkatan kapasitas inklusi disabilitas dan penilaian mandiri untuk empat politeknik Indonesia

Mungkin terdapat beberapa variasi dalam mendefinisikan disabilitas, maka laporan ini selaras dengan terminologi yang digunakan oleh UU No. 8/2016, yang mengacu PD dalam hal *keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau panca indera untuk jangka waktu lebih lama. Yang menghambat mereka untuk berpartisipasi penuh dan efektif di masyarakat atas dasar kesetaraan dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas*.⁹

Berdasarkan UU tersebut, PP No. 13/2020 tentang Akomodasi Layak bagi Siswa Penyandang Disabilitas, diterbitkan pada bulan Februari 2020. Peraturan ini *bertujuan untuk memastikan tersedianya akomodasi yang layak dalam sistem pendidikan melalui penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan daerah yang diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik inklusif maupun khusus*.¹⁰

8 ILO. "Indonesia Business and Disability Network", <https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/ibdn/lang-en/index.htm>. THIS URL IS INCORRECT

9 UNCT. "Disability Data in Indonesia" (2021). NEEDS URL, NOT LOCAL FILE
file:///C:/Users/kent/Documents/Reading/UNCT,%202021%20Disability%20Data%20in%20Indonesia.pdf

10 Article 5 of the regulation states that provision of budget and/or funding supports as referred to in article 4 paragraph (1) letter a is provided through allocations of national and/or regional budgets in accordance with statutory provisions and state or regional financial capacity.

Politeknik sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi harus mematuhi peraturan ini, tetapi banyak politeknik di Indonesia belum siap menerapkannya karena keterbatasan kebijakan internal, sarana, prasarana, kurikulum, proses pembelajaran dan layanan pendukung, serta kapasitas SDM.

Maka, guna mengembangkan kapasitas ini dan menilai kesiapan kelembagaan untuk menerima dan mendukung mahasiswa PD di empat politeknik program, lokakarya peningkatan kapasitas yang mencakup latihan penilaian mandiri disampaikan kepada tim pengajar dan pimpinan dari empat politeknik sebagai berikut:

- Polimarin - Semarang pada 17–18 dan 20 Oktober 2022
- Polimanado - Manado pada 25–26 November dan 1 Desember 2022
- PPNS - Surabaya pada 29–30 November dan 2 Desember 2022
- Polibatam - Batam pada 16–17 dan 19 Januari 2023

Lokakarya yang difasilitasi oleh SIGAB ini disusun ke dalam tujuh sesi:

- 1) Mengubah perspektif tentang disabilitas: Sesi ini bertujuan untuk mengubah perspektif peserta dari perspektif negatif (cacat) menjadi perspektif positif ('difabel' – orang dengan kemampuan berbeda). Peserta juga diperkenalkan dengan definisi dan konsep yang relevan terkait PD.
- 2) Politeknik inklusif: Sesi ini memperkenalkan peserta dengan konsep inklusi di lembaga pendidikan vokasi dan cara mempromosikan inklusi dan menghapuskan hambatan untuk mengakses

pendidikan dan pelatihan bagi PD.

- 3) Penilaian inklusi disabilitas untuk politeknik: Sesi ini memperkenalkan alat penilaian mandiri yang dapat digunakan peserta untuk meningkatkan sarana dan prasarana, materi pembelajaran, pendekatan pedagogis, kebijakan dan kegiatan terkait inklusi disabilitas di lembaga mereka.
- 4) Desain universal: Sesi ini memperkenalkan konsep desain universal dan inklusif menurut peraturan nasional, sebagian besar tentang sarana dan prasarana untuk PD.
- 5) Latihan penilaian disabilitas untuk fasilitas kampus: Sesi ini bertujuan untuk menguji alat untuk menilai sarana dan prasarana kampus termasuk hal-hal non-teknis, misalnya rancangan dan implementasi kebijakan, program dan kegiatan terkait PD. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menilai gedung dan fasilitas, serta berdiskusi dengan manajemen kampus.
- 6) Presentasi hasil penilaian berdasarkan latihan penilaian mandiri: Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penilaian untuk diskusi lebih lanjut dan penyusunan rencana aksi.
- 7) Langkah tindak lanjut: Sesi ini memfasilitasi penyusunan rencana aksi, termasuk tujuan jangka pendek hingga jangka panjang untuk mempromosikan inklusi sosial bagi PD yang memerlukan langkah tindak lanjut oleh lembaga-lembaga tersebut.

Masing-masing sesi disampaikan melalui pendekatan partisipatif yang mencakup permainan dan latihan penilaian mandiri, dengan tujuan akhir memfasilitasi penyusunan rencana berorientasi aksi untuk diimplementasikan di masing-masing politeknik.

Tabel 1.

Tingkat Pemahaman	PPNS		Polimarin		Polibatam		Polimanado	
	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah
1	8	0	3	0	16	0	8	0
2	6	0	2	0	7	0	6	0
3	4	0	1	1	0	0	4	0
4	2	0	2	2	3	0	2	0
5	2	0	1	2	0	0	2	0
6	4	4	1	2	2	9	4	0
7	0	2	0	2	1	12	0	4
8	0	5	1	1	0	2	0	8
9	1	7	0	0	0	3	1	7
10	0	9	0	0	0	3	0	5
Total Partisipasi	27	27	11	10	29	29	27	24

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan (Tabel 1) sebelum dan sesudah sesi pengembangan kapasitas, tingkat pemahaman peserta tentang konsep disabilitas meningkat secara signifikan.

Perspektif positif terkait disabilitas menjadi penting untuk meningkatkan inklusi sosial dalam mengakses pendidikan tinggi vokasi bagi PD. Setelah mengubah

perspektif disabilitas dari negatif menjadi positif, peserta meninjau dan mengidentifikasi program studi yang sudah ada yang dapat memfasilitasi akses dan partisipasi penyandang jenis disabilitas tertentu, dan mengusulkan penyesuaian untuk menghapuskan hambatan bagi PD dalam mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan. Hasil diskusi yang dilakukan di politeknik yang dinilai adalah sebagai berikut:

Politeknik	Program studi yang dapat disesuaikan untuk PD	Usulan penyesuaian
PPNS	1. Teknik Desain Manufaktur: Pemakai kruk dan penyandang tuna rungu; bukan untuk penyandang gangguan penglihatan atau disabilitas tangan. 2. Teknik Desain dan Konstruksi Kapal: Pemakai kruk dan bukan untuk penyandang gangguan penglihatan atau disabilitas tangan. 3. Teknik Otomatisasi: Pemakai kruk dan penyandang tuna rungu; bukan untuk penyandang gangguan penglihatan atau disabilitas tangan. 4. Teknik Pengelolaan Sampah: PD fisik. 5. Teknik Elektro Kapal: Pemakai kruk dan penyandang tuna rungu; bukan untuk penyandang gangguan penglihatan atau disabilitas tangan. 6. Teknik Perpipaian: Pemakai kruk dan penyandang tuna rungu; bukan untuk penyandang gangguan penglihatan atau disabilitas tangan. 7. Teknik Mesin Kapal: Pemakai kruk dan penyandang tuna rungu; bukan untuk penyandang gangguan penglihatan atau disabilitas tangan. 8. Manajemen Bisnis: Penyandang segala jenis disabilitas fisik; bukan untuk PD intelektual.	• Lakukan perbaikan kebijakan dan peraturan • Lakukan penyesuaian kurikulum • Lakukan penyesuaian sarana dan prasarana – akses ke ruang kelas, laboratorium, toilet dan perpustakaan • Lakukan peningkatan kesadaran persepsi disabilitas pada civitas akademika
Polibatam	1. Teknik mesin: Penyandang gangguan pendengaran (HoH) dan pemakai kruk. 2. D3 Akuntansi: PD fisik, penyandang tuna rungu, penyandang gangguan penglihatan, penyandang tuna netra, PD belajar. 3. D4 Manajemen Akuntansi: PD fisik, penyandang tuna rungu, penyandang tuna netra, PD belajar. 4. D4 Perdagangan Internasional & Logistik: PD fisik. 5. D4 Administrasi Bisnis Terapan: PD fisik. 6. D2 Jalur Cepat Distribusi Barang: PD fisik.	• Lakukan penyesuaian peraturan dan manajemen kebijakan • Lakukan perbaikan sarana dan prasarana, misalnya lift, toilet, gerbang masuk, landaian, balok pemandu, rambu-rambu dan tempat parkir • Lakukan peningkatan kapasitas bagi dosen dan staf untuk berkomunikasi dengan PD • Sediakan alat pembaca layar atau kaca pembesar untuk

Politeknik	Program studi yang dapat disesuaikan untuk PD	Usulan penyesuaian
	7. D3 Teknik Informatika: PD fisik, penyandang tuna rungu, penyandang tuna netra, PD fisik. 8. D3 Teknologi Geomatika: PD fisik, penyandang tuna rungu. 9. D4 Animasi: PD fisik, penyandang tuna rungu, penyandang tuna netra, PD fisik. 10. D4 Teknik Multimedia dan Jaringan: PD fisik, penyandang Tuna rungu, penyandang Tuna netra, PD fisik. 11. D4 Teknik Keamanan Siber: PD fisik. 12. D4 Teknik Perangkat Lunak: PD fisik.	penyandang tuna netra atau gangguan penglihatan Sediakan pusat layanan disabilitas
Polimarin	Selama ini, sebagian besar program studi di Polimarin belum bisa menerima PD karena standar keselamatan kerja, kecuali untuk program studi Transportasi Laut Jurusan Bisnis Maritim dan Manajemen Pelayaran; program-program studi tersebut cocok untuk PD fisik, penyandang gangguan pendengaran dan penyandang gangguan penglihatan.	- Sediakan sarana dan prasarana yang bisa diakses untuk PD: akses kursi roda, balok pemandu, lift, toilet, transportasi khusus, akomodasi dengan perlengkapan memadai - Lakukan peningkatan kapasitas dosen dan staf admin untuk berinteraksi dengan PD - Lakukan perbaikan kebijakan dan peraturan - Berikan afirmasi (alokasi khusus) dan perlakuan penyesuaian untuk PD
Polimanado	Semua jurusan dapat menerima PD sebagai mahasiswa dengan akomodasi yang memadai: - Teknik Sipil (D4 Teknik Jalan dan Jembatan, D4 Konstruksi Bangunan, D3 Teknik Sipil dan D4 Teknik Perumahan dan Permukiman) - Teknik Elektro (D4 Teknik Elektro, D4 Teknik Informatika, D3 Teknik Elektro dan D3 Teknik Komputer) - Teknik Mesin (D3 Teknik Mesin dan D4 Teknik Mesin Produksi dan Pemeliharaan) - Akuntansi (D4 Akuntansi Keuangan, D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi) - Administrasi Bisnis (D4 Manajemen Bisnis, D3 Administrasi Bisnis dan D3 Manajemen Pemasaran) - Pariwisata (D4 Manajemen Perhotelan, D3 Perhotelan, D3 Ekowisata Bawah Air dan D3 Agen Perjalanan)	- Sediakan sarana dan prasarana yang bisa diakses (jalur kursi roda dan balok pemandu, eskalator, toilet terakses untuk PD, transportasi dalam kampus dan asrama untuk PD) - Lakukan peningkatan kapasitas dosen dan staf untuk berkomunikasi dengan PD - Lakukan penyesuaian kebijakan akademik - Berikan afirmasi (memberikan kuota khusus) dengan menyesuaikan model/tes seleksi dengan perspektif PD selama proses pendaftaran

D. Hasil penilaian

Di masing-masing politeknik, sesi lokakaryanya serupa. Bila perubahan perspektif mengenai disabilitas di kalangan peserta sudah tercapai, maka peserta dikelompokkan untuk melakukan penilaian mandiri terhadap lembaganya mengenai inklusi disabilitas berdasarkan kesiapan komponen fisik dan non-fisik (misalnya kebijakan, proses pembelajaran, sarana, prasarana dan SDM).

Untuk menunjukkan nilai inklusi disabilitas, SIGAB mengembangkan alat penentuan nilai dari 1 sampai 3 untuk 18 komponen sebagai berikut:

- Nilai 0 = tidak inklusif sama sekali
- Nilai 1 = sebagian kriteria inklusifitas telah terpenuhi
- Nilai 2 = sebagian besar kriteria inklusifitas telah terpenuhi, tetapi belum semua
- Nilai 3 = kriteria terpenuhi sepenuhnya/inklusif

Berdasarkan hasil penilaian mandiri, SIGAB melakukan latihan validasi untuk menilai kesiapan politeknik di bidang-bidang inklusi disabilitas yang dinilai dan memberikan nilai untuk masing-masing politeknik. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Indikator	PPNS	Polibatam	Polimarin	Polimando
I. Perbincangan tentang kebijakan dan disabilitas				
a. Ada pernyataan visi dan misi serta nilai-nilai inklusi untuk semua orang termasuk PD.	1	0	0	2
b. Inklusi disabilitas rutin dibahas di kalangan civitas akademika di kampus.	3	2	1	1
I. Pemberdayaan administratif				
a. Kebijakan, peraturan, prosedur, dan praktik ditinjau secara berkala untuk menghapuskan hambatan dan meningkatkan inklusivitas orang-orang dengan beragam karakteristik termasuk PD.	2	1	0	1
b. Manajemen tingkat tinggi, dosen, staf administrasi, organisasi mahasiswa dilatih dan diberdayakan untuk mengambil tindakan atas desain universal dan akomodasi yang memadai bagi PD.	2	2	1	1
c. PD terlihat dan terwakili dalam organisasi kampus termasuk dalam jabatan kekuasaan/memiliki kewenangan (dosen, administrator dan organisasi kemahasiswaan).	1	0	0	1
I. Inklusi disabilitas di semua aspek				
a. Alokasi anggaran mencerminkan prinsip biaya desain universal untuk pembelajaran (UDL) dan menyediakan akomodasi yang memadai bagi PD (dosen, mahasiswa, staf admin, dan tamu).	1	2	0	2
b. Kriteria evaluasi mahasiswa (retensi, penyelesaian kuliah, kelulusan, dan lain-lain) sama untuk semua mahasiswa termasuk PD.	2	3	0	3
c. Publikasi, kegiatan pemasaran, dan materi hubungan masyarakat mencakup gambar dan konten terkait disabilitas.	0	0	0	0
d. Publikasi dan situs web termasuk kuliah berbasis web mematuhi standar aksesibilitas disabilitas.	0	1	0	1

Indikator	PPNS	Polibatam	Polimarin	Polimando
e. Tidak ada perisakan terhadap kelompok rentan termasuk PD.	3	2	1	1
f. Isu-isu disabilitas dimasukkan dalam kurikulum.	1	1	0	1
IV. Pusat layanan dan fasilitas disabilitas				
a. Kampus memiliki pusat layanan disabilitas yang memiliki staf profesional dan relawan mahasiswa termasuk juru bahasa isyarat.	0	0	0	1
b. Fasilitas kampus dapat diakses secara fisik (landaian, pegangan tangan, lift, toilet yang dapat diakses di semua lantai dan parkir untuk disabilitas).	1	1	1	2
c. Perpustakaan yang dapat diakses oleh PD menyediakan buku digital, jurnal, dan layanan digitalisasi, dan pojok disabilitas menyediakan teknologi adaptif seperti pembaca layar dan kaca pembesar.	0	0	0	0
d. Ruang kelas, aula, dan teater dengan panggung dan kursi dapat diakses oleh PD (dengan landaian).	2	2	0	2
I. Perkuliahan dan kegiatan kampus				
a. Perkuliahan yang melibatkan PD diadakan di ruang kelas yang dapat diakses.	1	3	0	2
b. Kegiatan kampus (misalnya seni, kegiatan akademik, karya wisata) baik di luar maupun di dalam ruangan dapat diakses oleh semua orang termasuk PD.	2	2	0	2
c. Program kegiatan menyediakan pendamping disabilitas dan juru bahasa isyarat.	0	0	0	0
Total nilai untuk Indeks Aksesibilitas dan Inklusivitas (1-3)	1.33	1.22	0.22	1.39

Catatan:

- Nilai 0-0,9: Kampus non-inklusif
- Nilai 1-1,9: Kampus pra-inklusif
- Nilai 2-2,9: Kampus inklusif
- Nilai 3,0: Kampus inklusif total

E. Rekomendasi

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, SIGAB membuat rekomendasi berikut agar menjadi politeknik yang inklusif:

Bidang perbaikan	PPNS	Polibatam	Polimarin	Polimanado
1. Inklusi disabilitas di kampus hendaknya dinyatakan secara eksplisit di dalam misi, visi, dan nilai-nilai lembaga.	✓	✓	✓	✓
2. Topik disabilitas hendaknya lebih sering dibahas, termasuk pendidikan inklusif.	0	✓	✓	✓
3. Kebijakan, prosedur dan praktik hendaknya ditinjau secara berkala untuk menghapuskan hambatan dan memberikan inklusivitas bagi orang-orang dengan beragam karakteristik, termasuk PD.	✓	✓	✓	✓
4. Pimpinan/manajemen, staf administrasi, dosen dan organisasi kemahasiswaan hendaknya meningkatkan kapasitas mereka untuk bertindak seputar desain universal dan akomodasi yang layak bagi PD.	✓	✓	✓	✓
5. Kesempatan bagi PD sebagai mahasiswa hendaknya diperluas di semua program studi, termasuk untuk dosen dan organisasi kemahasiswaan.	0	✓	✓	✓
6. Alokasi anggaran hendaknya mencerminkan biaya inklusi disabilitas untuk menerapkan desain universal dan prinsip-prinsip pembelajaran dan menyediakan akomodasi yang layak bagi PD (mahasiswa, dosen dan seluruh pegawai politeknik).	✓	✓	✓	✓
7. Sebagai kampus inklusif, pengukuran kinerja (misalnya retensi, penyelesaian kuliah, dan kelulusan) hendaknya menyediakan data untuk semua mahasiswa, termasuk PD.	✓	0	✓	0
8. Aksesibilitas dan inklusi disabilitas hendaknya dipromosikan di seluruh kampus melalui kegiatan pemasaran, publikasi dan kampanye komunikasi.	✓	✓	✓	✓
9. Semua publikasi, pelantar daring dan kuliah digital harus dapat diakses oleh PD.	✓	✓	✓	✓
10. Toleransi nol terhadap perisakan di kampus hendaknya dipertahankan dan staf dididik tentang berbagai perspektif inklusi disabilitas.	0	✓	✓	0
11. Inklusi disabilitas hendaknya terintegrasi sebagai komponen kurikulum, proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	✓	✓	✓	✓
12. Pusat Layanan Disabilitas (PLD) hendaknya dibentuk dengan mempekerjakan staf profesional dan relawan mahasiswa termasuk Juru Bahasa Isyarat (JBI).	✓	✓	✓	✓

Bidang perbaikan	PPNS	Polibatam	Polimarin	Polimanado
13. Semua fasilitas fisik harus disesuaikan dan dapat diakses oleh PD, termasuk landaian, balok pemandu, pegangan tangan, eskalator, toilet dan meja penerima tamu.	✓	✓	✓	✓
14. Buku/jurnal digital hendaknya dapat diakses di perpustakaan dengan layanan digitalisasi buku dan pojok disabilitas dengan teknologi adaptif, misalnya pembaca layar dan kaca pembesar.	✓	✓	✓	✓
15. Ruang teater hendaknya dilengkapi dengan landaian.	✓	✓	✓	✓
16. Proses pembelajaran yang melibatkan PD hendaknya dilaksanakan di gedung pembelajaran terpadu.	✓	0	✓	✓
17. Semua kegiatan (seni, akademik, rekreasi) di kampus hendaknya diadakan di tempat yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk PD.	✓	✓	✓	✓
18. Semua kegiatan hendaknya memastikan ada pendamping untuk PD dan JBI.	✓	✓	✓	✓
19. Mitra industri hendaknya dilibatkan untuk mempromosikan penempatan lulusan PD.	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

✓ perlu perbaikan

0 perlu dipertahankan atau ditingkatkan

F. Tantangan saat ini

Beberapa tantangan ditemukan selama penilaian dan diskusi lanjutan dengan staf dan mahasiswa di empat politeknik tersebut, antara lain sebagai berikut:

► Desain universal

‘Desain universal’ mengacu pada desain produk, lingkungan, program dan layanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan penyesuaian atau desain khusus.¹¹

Untuk melaksanakan UU Nasional No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri No. 14/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Peraturan ini memberikan pedoman teknis untuk mewujudkan bangunan yang dapat diakses oleh semua orang termasuk PD sebagaimana dinyatakan dalam standar desain sarana dan prasarana pembelajaran di perguruan tinggi.

Namun, keempat politeknik mitra tersebut masih perlu melakukan penyesuaian aksesibilitas fisik untuk memfasilitasi penggunaan secara universal, khususnya bagi PD. Meskipun tiga politeknik memiliki gedung baru dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung PD dalam mengakses gedung, misalnya balok pemandu, lift, landaian untuk kursi roda, toilet khusus, area parkir untuk PD dan rambu-rambu, peningkatan tambahan tetap diperlukan.

Di masing-masing politeknik, penilaian dilakukan di gedung-gedung utama kampus, meliputi ruang kelas, ruang teater, area parkir, perpustakaan, laboratorium dan fasilitas umum.

► Kompetensi standar

Dalam pendidikan tinggi vokasi, perolehan kompetensi kerja merupakan kunci keberhasilan transisi dari sekolah ke pasar tenaga kerja sebagaimana tercermin dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI), sebagaimana disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Meskipun terdapat kebutuhan mendesak untuk

11 Definisi diambil dari “Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas”, <https://ham.go.id/crcpd/#>

memfasilitasi transisi PD ke pasar tenaga kerja, khususnya di pekerjaan sektor maritim, PD tetap menghadapi beberapa tantangan untuk memenuhi SKKNI karena perbedaan standar untuk PD.

► **Pembelajaran berbasis kerja (program pemagangan industri dan pemagangan sekolah)**

Mahasiswa PD menghadapi berbagai tantangan saat mengakses program pemagangan industri dan pemagangan sekolah karena tidak tersedianya fasilitas dan alat yang memadai di tempat kerja mitra industri dan juga terbatasnya jumlah SDM yang memahami kebutuhan PD. Karena itu, PD memiliki pengalaman belajar berbasis kerja yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa bukan PD.

► **Kemampuan kerja**

Menurut UU Nasional No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, diwajibkan minimal 1% dari total pekerja di perusahaan swasta adalah PD – dan 2% di perusahaan milik negara (BUMN). Namun, karena berbagai tantangan terkait tingkat kompetensi dan pengalaman belajar berbasis kerja serta keberadaan fasilitas yang memadai di tempat kerja industri, PD tetap menghadapi tantangan saat memasuki dan bertransisi di pasar tenaga kerja. Karena itu, penting bagi industri untuk lebih memahami dan mengubah perspektif mereka tentang disabilitas, yang pada akhirnya memperkuat hubungan dengan politeknik inklusif dengan tujuan untuk menyediakan pekerjaan layak bagi PD.

Kesimpulan dan langkah selanjutnya

Kesimpulan

- Gedung yang dinilai di tiga politeknik – PPNS, Polibatam dan Polimando – termasuk dalam kategori pra-inklusif, sedangkan gedung yang dinilai di Polimarin dikategorikan sebagai non-inklusif. Ketiga politeknik tersebut memiliki gedung baru yang sesuai dengan peraturan PUPR No. 14/2017.
- Alat dapat digunakan untuk menilai semua bangunan dan fasilitas di tiap politeknik.
- Polimarin akan membangun sebuah gedung baru yang harus sesuai dengan peraturan PUPR No. 14/2017 dan akan menggunakan laporan penilaian untuk bangunan baru dengan semua rekomendasi teknis untuk akses universal.
- PPNS menandatangani Nota Kesepahaman dengan SIGAB untuk mendukung peningkatan kapasitas mengenai inklusi disabilitas di PPNS dan juga para mitranya.
- Empat politeknik menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi penilaian inklusi disabilitas dengan dukungan lebih lanjut dari INKLUSI.

Langkah selanjutnya:

- Adakan lokakarya nasional yang diikuti oleh perwakilan dari industri-industri terkait dan para mitra politeknik terkait inklusi disabilitas ketenagakerjaan, termasuk BNSP.
- Sertakan inklusi disabilitas dalam pertemuan dewan penasehat di PPNS sebagai model percontohan inklusi disabilitas ketenagakerjaan.
- Perluas Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani SIGAB dengan ketiga politeknik lainnya yang bertujuan mengarusutamakan inklusi disabilitas mereka.
- Doronglah politeknik agar menjadi anggota Jaringan Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI). Untuk informasi lebih lanjut lihat: <https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/ibdn/lang-en/index.htm>

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim SfP-Indonesia ILO mengucapkan terima kasih kepada:

- Pemerintah Inggris atas dukungan keuangan untuk melakukan penilaian melalui Program Skills for Prosperity ILO-Inggris di Indonesia.
- Kedutaan Besar Inggris di Jakarta atas kerja samanya dengan ILO dalam pelaksanaan kegiatan proyek SfP di Indonesia.
- SIGAB atas proses fasilitasi peningkatan kapasitas dan penilaian inklusi disabilitas di empat politeknik.
- INKLUSI, program Kemitraan Australia-Indonesia atas dukungan akomodasi dan transportasi personel SIGAB ke empat politeknik.
- Titik fokus GEDSI PPNS meliputi Rina Sandora, Aditya Maharani dan Nurul Hidayati atas fasilitasi proses penilaian di PPNS.
- Titik fokus GEDSI Polibatam meliputi Shinta Wahyu Hati, Winanda Wahana Warga Dalam, Diah Amalia dan Salmu Fajri atas fasilitasi proses penilaian di Polibatam.
- Titik fokus GEDSI Polimando meliputi Radjab Djamali, Deisy Ch.Andih dan Merryany Theresia Bawole atas fasilitasi proses penilaian di Polimando.
- Titik fokus GEDSI Polimarin meliputi Septina Dwi Retnandari, Ari Ani Dyah Setyoningrum dan Dhesi Wulan Sari atas fasilitasi proses penilaian di Polimarin.

International Labour Organization

Kantor Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22

Jl. M. H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250

Indonesia

T: +62 (21) 391 3112

E: jakarta@ilo.org